

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan suatu kegiatan ekonomi yang kecil namun memiliki dampak yang besar dalam perekonomian suatu daerah yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. UMKM berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia, selain itu UMKM juga berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) usaha kecil yaitu usaha yang jumlah tenaganya antara 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah yaitu jumlah tenaganya antara 20 sampai dengan 99 orang.

Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 menyatakan tentang UMKM, dapat didefinisikan yaitu Usaha Mikro adalah usaha aktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro (dengan aset maksimal 50 juta dan omset 300 juta). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi aktif yang dikelola perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dari induk perusahaan, dimiliki atau menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang di atas. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi aktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh

perorangan atau badan usaha, yang menjadi usaha bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar dan jumlah kekayaan bersih atau hasil dari penjualan secara tahunan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang ini.

UMKM sendiri tidak dapat dipungkiri lagi menjadi penopang ekonomi dan sekaligus memiliki karakteristik yang resilien pada periode-periode krisis Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada krisis moneter tahun 1997/1998 dan periode krisis keuangan pada tahun 2008/2009. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto telah menekankan bahwa “UMKM juga merupakan *critical engine* yang berperan penting dalam mempertahankan momentum pemulihan ekonomi pada periode pandemi Covid-19 (Limanseto, 2021)

Kontribusi UMKM terhadap PDB telah mencapai 61,97% dari total PDB nasional yang setara dengan Rp 8.500 triliun, dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional pada tahun 2020. UMKM juga sangat berperan dalam mendorong peningkatan investasi dan ekspor Indonesia. Total investasi di sektor UMKM telah mencapai 60,4% dari total Investasi nasional dan kontribusinya terhadap ekspor non migas nasional telah mencapai 16% (Investasi/BPKM, 2020).

Pemerintah Indonesia menunjukkan perhatian besar terhadap UMKM dengan membantu permodalan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan intensif dan pembiayaan melalui program PEN, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), yang diharapkan menjadi sebuah

solusi terhadap pembiayaan modal UMKM. Tidak hanya di sektor modal akan tetapi pemerintah juga membantu dengan menyelenggarakan program – program untuk melatih kewirausahaan masyarakat. Sehingga keberhasilan UMKM mampu meningkatkan perekonomian Indonesia melalui kegiatan operasionalnya yang mandiri dan tidak menanggung beban besar. (Limanseto, 2021a)

Kim dan Elias (2008) dalam penelitian (As’adi & Chalimi, 2020) berpendapat bahwa laporan keuangan merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan instansi pemberi kredit dalam pengambilan keputusan kredit. Dengan dijadikannya sebuah pertimbangan maka UMKM perlu dan harus membuat laporan keuangan mandiri agar mampu memperoleh pembiayaan kredit. Selain itu laporan keuangan juga memiliki manfaat bagi pemilik usaha yakni dapat mengetahui sejauh mana perkembangan usahanya saat ini. UMKM sedikit dipermudah dengan diterbitkannya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang dimana SAK EMKM tersebut efektif per 1 Januari 2018.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) berpendapat berdasarkan (Siagian & Indra, 2019) bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian secara terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. Laporan keuangan menyajikan berbagai informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban yang di dalamnya termasuk

keuntungan atau kerugian, kontribusi, serta arus kas. Dengan adanya entitas yang disajikan maka dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

IAI menyatakan bahwa SAK EMKM merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan dan memenuhi definisi serta kriteria UMKM sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama tiga tahun berturut-turut. SAK EMKM ini diterapkan berdasarkan asumsi dasar akrual dan keberlangsungan usaha. Upaya dari pemerintah dalam penerapan SAK EMKM diharapkan bisa mempermudah entitas dalam melakukan perubahan pelaporan yang berbasis kas ke pelaporan keuangan dengan dasar akrual. Kemudahan yang diberikan pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan UMKM melalui penerapan SAK EMKM apakah dapat menjadi tolok ukur dalam menjaga kualitas laporan keuangan usaha mikro dan kecil. (Prajanto & Septriana, 2018) menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) terhadap kualitas laporan keuangan saat ini masih sangat minim, hal ini disebabkan oleh pelaku usaha masih rendah dalam memahami pembukuan sesuai dengan SAK EMKM.

Persepsi merupakan tindakan individu dalam menafsirkan dan memberikan arti terhadap lingkungan. Seorang pelaku usaha seharusnya memiliki pandangan atau persepsi bahwa akuntansi memiliki banyak manfaat dalam dunia bisnis (Mouti, 2020). Persepsi lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran, ingatan, pikiran, dan bahasa. Begitu halnya dengan persepsi pelaku UMKM dalam menyusun laporan. Persepsi pengusaha atas laporan

keuangan masih di rasa sangat rendah sehingga mengakibatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan tidak berpengaruh terhadap besaran kredit yang diperoleh UMKM (Prajanto & Septriana, 2018)

Pengetahuan akuntansi pemilik usaha juga sangat penting dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Pelaku UMKM harus mengerti bagaimana sistem pencatatan akuntansi, apa dan bagaimana penerapan pencatatan akuntansi yang baik dan benar sesuai standar akuntansi keuangannya sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang memadai. Namun penerapan SAK EMKM terhadap kualitas laporan keuangan saat ini masih sangat minim, hal ini dikarenakan pemilik usaha masih rendah dalam memahami dan mengetahui pembukuan yang sesuai dengan SAK EMKM. Pemilik usaha mikro sudah membuat laporan keuangan yang sangat sederhana dengan pengetahuan akuntansi yang dimiliki juga sederhana. (As'adi & Chalimi, 2020)

Selain dari pengetahuan akuntansi, pengalaman pemilik usaha juga menjadi pertimbangan dalam menyusun laporan berstandar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Pemilik usaha mendapatkan informasi yang berbeda dalam menafsirkan nilai informasi akuntansi. Suatu pengalaman yang nyata dapat memberikan suatu pandangan yang tepat atas informasi akuntansi dengan proses pengalaman dan pembelajaran (As'adi & Chalimi, 2020). Pengalaman usaha juga bisa menentukan persepsi penggunaan informasi akuntansi pada pelaku UMKM.

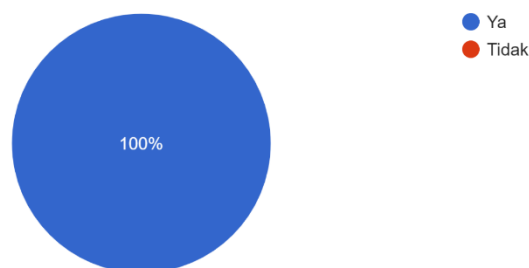
Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan UMKM yaitu pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan akuntansi.

Hal ini juga tidak luput dari UMKM yang mendukung sektor tersebut untuk semakin berkembang. Pasca dilantiknya bupati dan wakil bupati Sumenep periode 2021-2024, program prioritas utama pada tahun pertama adalah meningkatkan UMKM, baik itu kuliner maupun cemilan. Program prioritas tersebut merupakan suatu program untuk memulihkan perekonomian yang jelas sudah terdampak Covid-19 (Kachonk, 2021). Pelaku usaha mikro dan kecil membutuhkan sistem pembiayaan yang lebih mendukung pada keberhasilan usahanya. Di kabupaten Sumenep sendiri terdapat peningkatan pada usaha mikro yang sangat signifikan, hal ini dikarenakan adanya informasi tentang bantuan presiden (banpres) untuk penguatan modal (RAZIN, 2022) dan juga program dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumenep yang terus menggiatkan sejumlah program guna peningkatan UMKM. Program tersebut meliputi pelatihan atau kursus digital marketing, management pemasaran dan komunikasi, pelatihan penyusunan laporan keuangan, dan lain sebagainya. Namun dalam penelitian Hotijah (2019) menyebutkan bahwa pada Dinas Koperasi dan UMKM di Sumenep ada lima puluh UMKM yang masih aktif dalam melakukan pemasaran, bahkan ada lima UMKM yang berpotensi ekspor dan sudah pernah ekspor, tetapi UMKM tersebut tidak melakukan pembukuan, dikarenakan pelaku UMKM hanya fokus terhadap beberapa hal seperti kegiatan operasional. Padahal masih banyak yang harus dilakukan oleh

pelaku UMKM, salah satunya melakukan pembukuan karena dengan melakukan pembukuan keuangan usahanya bisa lebih tertata dan menjadi alat pembantu dalam permodalan usahanya.

Peningkatan UMKM di Kabupaten Sumenep khususnya pada usaha mikro yang berdasarkan UU RI No.20 pasal 6 Tahun 2008 tentang usaha mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, dan mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp300 juta dalam setahun. Sehingga peneliti memiliki keinginan untuk menjadikan usaha mikro sebagai target populasi dengan objek kualitas laporan keuangan, yang diharapkan bisa membantu pelaku usaha dalam menjalankan dan mengemkembangkan usahanya kearah yang lebih baik.

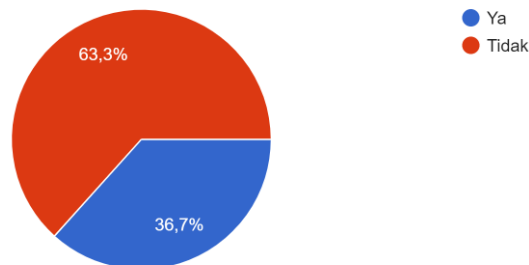
Apakah anda melakukan pencatatan sederhana atas aktivitas transaksi usaha?
30 responses



Gambar 1. 1
Kurva Pencatatan

(sumber : lampiran 2 mini riset, kerangka pikir)

Apakah anda sudah membuat laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan neraca?
30 jawaban



Gambar 1.2
Kurva Pencatatan

(sumber : lampiran 2 mini riset, kerangka pikir)

Gambar diatas merupakan mini riset yang dilakukan peneliti terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep sebanyak 30 pelaku UMKM. Mini riset yang dilakukan ini menggunakan kriteria UMKM minimal dua tahun usaha berjalan. Hasil dari mini riset tersebut dapat disimpulkan bahwa 30 pelaku UMKM telah melakukan pencatatan sederhana atas aktivitas usahanya. Disamping itu sekitar 36,7% telah melakukan pelaporan keuangan yang memuat laporan laba rugi dan neraca, dan sekitar 63,3% tidak melakukan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena banyakna persepsi pelaku UMKM mengatakan bahwa akuntansi itu sulit dan ribet. Pemahaman atas pengetahuan akuntansi dan pengalaman pemilik usaha pun dirasa kurang menjadi kendala.

Self efficacy bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penulisan laporan keaungan akuntansi. *Self efficacy* juga memberikan

dorongan dan keyakinan terhadap pengetahuan akuntansi yang digunakan untuk mengambil keputusan didalam UMKM.

Penelitian sebelumnya mengenai persepsi pelaku UMKM dilakukan oleh Baihaqi (2017) menunjukkan bahwa persepsi atas tujuan laporan keuangan pelaku usaha berpengaruh terhadap kualitas laporan UMKM. Penelitian Badria & Diana (2018) juga menunjukkan bahwa persepsi pelaku UMKM berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan SAK EMKM. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Febriyanti & Wardhani (2018) menunjukkan bahwa persepsi memiliki hubungan positif signifikan terhadap penerapan SAK EMKM. Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Janrosli (2018) yang menunjukkan bahwa persepsi tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan SAK EMKM. Kemudian, penelitian oleh Nur Fadila (2019) terkait variabel pengetahuan akuntansi menunjukkan hasil bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh As'adi & Chalimi (2020) yang menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih & Farina (2021) yang menggunakan pemahaman akuntansi sebagai variabel independen dan menunjukkan hasil bahwa pemahaman akuntansi tidak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM. Kemudian, penelitian terkait variabel pengalaman pemilik usaha yang dilakukan oleh Nur Fadilah (2019)

menunjukkan bahwa lama usaha berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian dari As'adi & Chalimi (2020) menunjukkan bahwa pengalaman pemilik usaha berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM. Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Silvia & Azmi (2019) yang menggunakan lama usaha sebagai variabel independen dan menunjukkan hasil bahwa lama usaha tidak berpengaruh terhadap persepsi pengusaha UMKM terkait pentingnya laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Penelitian oleh Setyaningsih & Farina (2021) juga menunjukkan hasil bahwa pelatihan akuntansi tidak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.

Berdasarkan fenomena dari hasil penelitian yang tidak konsisten maka peneliti ingin menguji kembali karena masih ada perbedaan hasil di penelitian sebelumnya. Disamping itu peneliti menggunakan variabel independen persepsi pelaku usaha, pengetahuan akuntansi dan pengalaman pemilik usaha terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, dan disamping itu peneliti juga menambahkan variabel pendukung yaitu *self efficacy* sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan kondisi diatas, timbul ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian mengenai kualitas laporan keuangan UMKM di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini akan menggunakan variabel persepsi pelaku usaha, pengetahuan dan pengalaman pemilik yang merupakan replika dari variabel-variabel penelitian sebelumnya. Penelitian ini berjudul

“Kualitas Laporan Keuangan UMKM Berbasis SAK EMKM : *Self Efficacy* Sebagai Variabel Moderasi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah persepsi pelaku usaha berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM yang berdasar pada SAK EMKM di Sumenep
2. Apakah pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM yang berdasar pada SAK EMKM di Sumenep
3. Apakah pengalaman pemilik usaha berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM yang berdasar pada SAK EMKM di Sumenep
4. Apakah persepsi pelaku usaha berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM yang berdasar pada SAK EMKM dengan dimoderasi *self-efficacy*
5. Apakah pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM yang berdasar pada SAK EMKM dengan dimoderasi *self-efficacy*
6. Apakah pengalaman pemilik usaha berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM yang berdasar pada SAK EMKM dengan dimoderasi *self-efficacy*

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh persepsi pelaku usaha terhadap kualitas laporan keuangan UMKM yang berdasar pada SAK EMKM di Sumenep
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan UMKM yang berdasar pada SAK EMKM di Sumenep
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pengalaman pemilik usaha terhadap kualitas laporan keuangan UMKM yang berdasar pada SAK EMKM di Sumenep
4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh persepsi terhadap kualitas laporan keuangan UMKM yang berdasar pada SAK EMKM dengan dimoderasi *self-efficacy*
5. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan UMKM yang berdasar pada SAK EMKM dengan dimoderasi *self-efficacy*
6. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pengalaman pemilik usaha terhadap kualitas laporan keuangan UMKM yang berdasar pada SAK EMKM dengan dimoderasi *self-efficacy*

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - Bagi pelaku UMKM, semoga dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengatur kebijakan keuangan agar lebih efisien

- Bagi peneliti lain, semoga bisa dijadikan referensi penelitian selanjutnya dan sebagai perbaikan penelitian selanjutnya

b. Manfaat praktis

Diharapkan bisa memberikan informasi yang berguna dalam mendukung penelitian selanjutnya sehingga dapat digunakan sebagai acuan menyusun kebijakan.